

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM
MENGEMBANGKAN SENI BUDAYA PARAHU BAGANDUANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH:

ALEX SANDER
137310743

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alex Sander
NPM : 13251013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni Budaya

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Pekanbaru, 15 April 2019

An. Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris

Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketia,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Mulianto S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 380 /UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Menteri RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : Alex Sander |
| N.P.M | : 137310743 |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S1) |
| Judul Skripsi | : Peran Diras Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni Budaya Perahu bagnaduang. |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusandi, S.Sos, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Data Wardana, Sos, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. Rangi Ade Febrian, S.P, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Andriyus, S.Sos, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri, S.Sos, MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 April 2019
An. Dekan

Dr. H. Patra Seryo Prihatin, S.Ip., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Kenu Prodi
4. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Islam Riau peserta ujian korehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alex sandre

NPM :137310743

Program studi : ilmu pemerintahan

Jenjang pendidik : strata satu (S.1)

Judul skripsi : PERANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENGEMBANGKAN SENI BUDAYA PARAHU BAGANDUANG

Atas naskah yang daftarkan pada ujian korehensif skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademis dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas dan universitas
3. Bahwa, apabila kemudian hari di temukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi seluruh atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 atau 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian korehensif skripsi yang saya telah ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum negara RI.

Demikian pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, april 2019


PETERAI TEMPEL
0223AE17E2343E2
6000
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Alex sandre

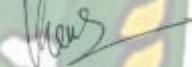
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Alex Sander
NPM : 12720011
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni Budaya

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji konferensi-fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 15 April 2019

| | |
|--|--|
| Ketua,  Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si | Sekretaris  Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si Anggota,  Dana Wardani, S.Sos., M.Si Anggota,  Andriyus, S.Sos., M.Si |
|--|--|

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 30/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 11 April 2019 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Alex Sander
NPM : 137310743
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya Perahu Bagnaduang.
Nilai Ujian : Angka : 71,65 ; Huruf : B
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------------|------------|----------------|
| 1. | Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Ketua | 1. [Signature] |
| 2. | Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. | Sekretaris | 2. [Signature] |
| 3. | Data Wardana, S.Sos., M.Si. | Anggota | 3. [Signature] |
| 4. | Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. | Anggota | 4. [Signature] |
| 5. | Andriyus, S.Sos., M.Si. | Anggota | 5. [Signature] |
| 6. | Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Notulen | 6. [Signature] |

Pekanbaru, 11 April 2019
An. Dekan
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni Budaya

ABSTRAK

Alex Sander
137310743

Kata Kunci : Kerjasama Pengembangan, Monitoring Pengembangan, Evaluasi Pengembangan, Penyelenggaraan Promosi

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang. Seseorang akan dinyatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan mencakup tiga aspek. Pertama, peranan merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat. Perilaku seseorang yang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. Kedua, peranan merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Ketiga, peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Permasalahan yang muncul yakni belum terealisasinya perencanaan pengembangan seni budaya yang ada, sehingga banyak seni budaya yang belum mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik, terutama seni budaya Perahu Baganduang. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi cukup berperan dalam mengembangkan seni budaya perahu baganduang. Peran tersebut terlebih dahulu atas bantuan yang diberikan oleh pihak dinas tentang sarana dan prasarana yang diperlukan oleh kelompok seni budaya perahu baganduang, dan pihak kedinasan juga memfasilitasi setiap pelaksanaan pagelaran seni budaya perahu baganduang. Hal tersebut juga sebagai wujud peran serta mereka dalam pengembangan seni budaya perahu baganduang di Kabupaten Kuantan Singingi.

Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni Budaya

ABSTRAK

Alex Sander
137310743

Keywords: Cooperation Development, Monitoring Development, Development Evaluation, Promotion Promotion

The role is a dynamic aspect of one's position or status. Someone will be declared to carry out the role after carrying out their rights and obligations in accordance with their position. the role includes three aspects. First, the role is an assessment of the behavior of someone who is in the community. A person's behavior is related to his position and position in society. Such behavior is regulated by regulations that apply to guide someone in the community. Second, roles are concepts carried out by someone in the community in accordance with their position. Third, the role is someone's behavior that is important for the social structure of society. The problems that arise are the unrealized development of existing art and culture planning, so that many cultural arts have not been able to be managed and developed well, especially the art of boat culture. Kuantan Singingi. Types and sources of data used primary data and secondary data, while collecting data through the results of observations, interviews, and research documentation. After the data is obtained and then grouped according to its type in a table, then the data is analyzed and linked to theories in the form of descriptions so that conclusions can be taken. Based on the research results of the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports of Kuantan Singingi Regency, it is quite instrumental in developing the art of boat culture and culture. The role was firstly for the assistance provided by the service office regarding the facilities and infrastructure needed by the boat boat culture arts group, and the official also facilitated the performance of the art and culture boat performances. It is also a manifestation of their participation in the development of cultural arts and boat boats in Kuantan Singingi Regency.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan judul “*Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya*”. Penyelesaian Proposal ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH,Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Morris Adidi Yogia selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan proposal ini hingga selesai.
5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing dari awal hingga selesainya proposal.
6. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
8. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

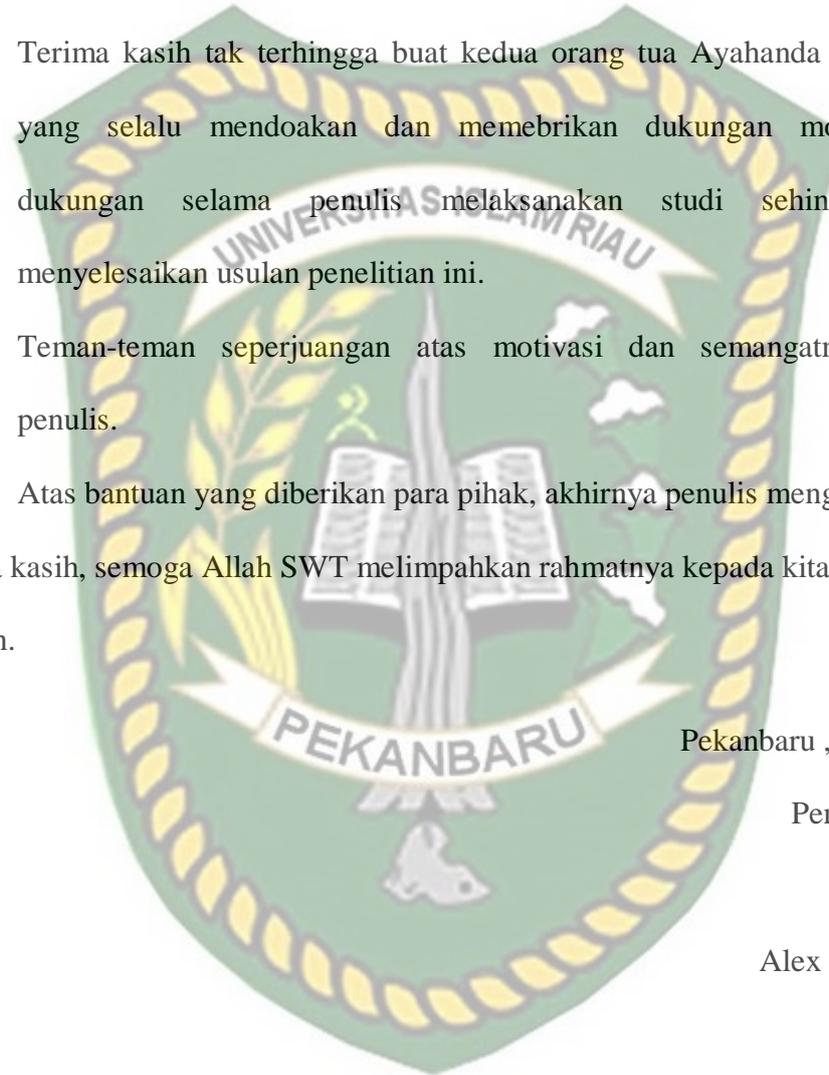
Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Aamin.

Pekanbaru , 2019

Penulis

Alex Sander



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 14 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 14 |
| 1. Ilmu Pemerintahan..... | 14 |
| 2. Konsep Pemerintahan..... | 14 |
| 3. Konsep Peranan..... | 17 |
| 4. Konsep Manajemen..... | 20 |
| 5. Konsep Tugas dan Fungsi..... | 22 |
| 6. Kebijakan Publik..... | 25 |
| 7. Teori Pariwisata..... | 28 |
| 8. Pariwisata Budaya..... | 29 |
| B. Kerangka Pikir..... | 30 |
| C. Konsep Operasional..... | 31 |
| D. Operasionalisasi Variabel..... | 33 |
| E. Teknik Pengukuran..... | 34 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 37 |

| | |
|--|----|
| A. Tipe Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Informan | 37 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 38 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 39 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| G. Model Analisis Data Kualitatif | 40 |
| H. Jadwal Waktu Penelitian | 40 |
| BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | 43 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi..... | 43 |
| 1. Agama | 45 |
| 2. Kebudayaan..... | 45 |
| 3. Pendidikan..... | 45 |
| 4. Kesehatan | 46 |
| B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi | 46 |
| 1. Umum | 46 |
| 2. Visi | 46 |
| 3. Misi | 48 |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi | 49 |
| BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 59 |
| A. Identitas Informan | 59 |
| 1. Tingkat Pendidikan Informan | 59 |
| 2. Tingkat Umur Informan | 60 |
| B. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya..... | 61 |
| 1. Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan | 62 |
| 2. Monitoring Pengembangan | 64 |
| 3. Evaluasi Pengembangan..... | 67 |
| 4. Penyelenggaraan Promosi | 69 |

| | |
|--|-----------|
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 71 |
| BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran..... | 74 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 75 |
| DOKUMENTASI PENELITIAN | 77 |



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

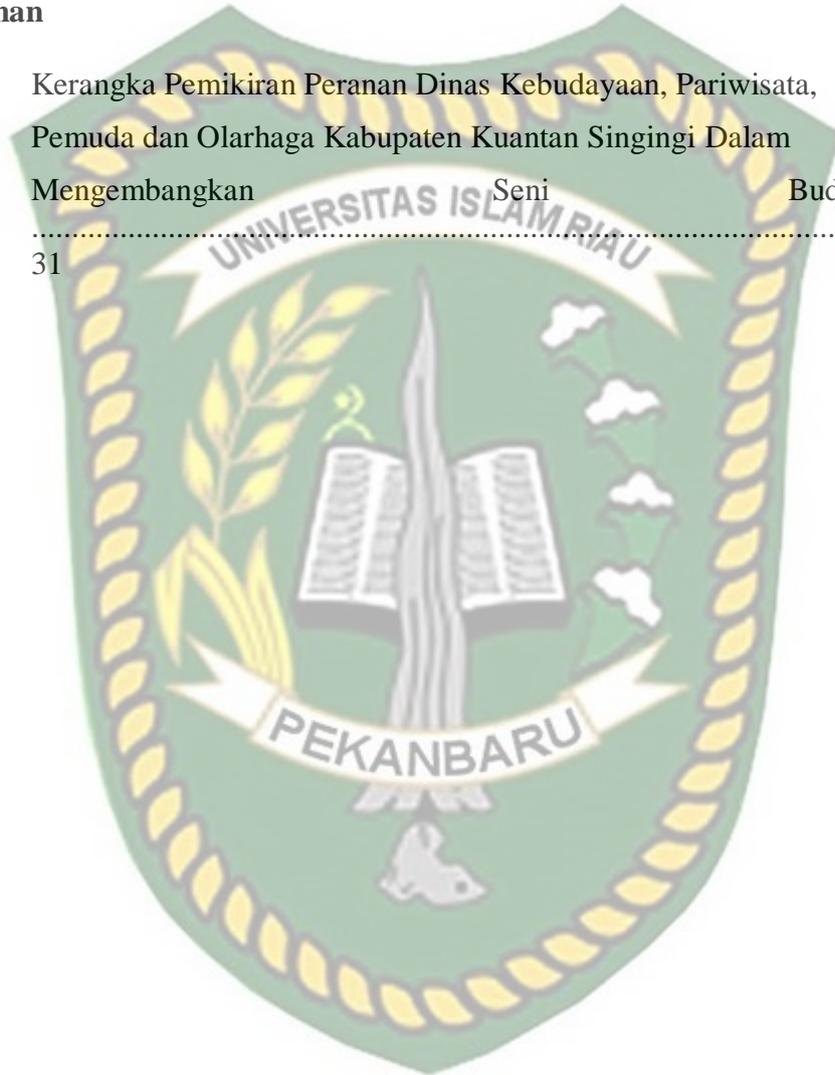
**Tabel
Halaman**

| | | | | |
|-----|---|---|-------|----|
| 1.1 | : | Potensi Wisata dari Seni Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi | | 6 |
| 1.2 | : | Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017 | | 11 |
| 2.1 | : | Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni Budaya | | 34 |
| 3.1 | : | Jumlah Informan Penelitian | | 40 |
| 3.2 | : | Jadwal Waktu Penelitian | | 41 |
| 5.1 | : | Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | | 59 |
| 5.2 | : | Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur | | 60 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

- 2.1 : Kerangka Pemikiran Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam
Mengembangkan Seni Budaya
.....
31



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang dikatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara bertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan".

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Salah satu dari Daerah Otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara 0°00 – 1°00 lintang selatan dan 101°02 – 101°55 bujur timur dengan luas wilayah ±7.656,03 Km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatar permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 15 Kecamatan sejumlah 218 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah penduduk 310.619 jiwa terdiri dari 159.580 jiwa laki-laki dan 151.139 jiwa perempuan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan kebijakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka struktur organisasi Dinas dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, Membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 2. Seksi Pengkajian Sejarah, Museum dan Nilai Tradisional;
 3. Seksi Kesenian.
- d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut memudahkan Dinas atau Instansi terkait dalam mengelola objek wisata. Sebagaimana diketahui salah satu sumber pemasukan daerah dan juga negara sedikit banyaknya berasal dari bidang kepariwisataan.

Adapun yang menangani berkaitan kebudayaan yaitu bidang kebudayaan, seksi pengembangan kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Seksi Pengembangan Objek dan Aktivitas Wisata memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan saran dan prasarana pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- e. Menyiapkan bahan telaahan pengembangan objek dan aktifitas wisata;

- f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja seksi pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Objek wisata di Kabupaten Kuantan Singingi sangat banyak dan perlu dilakukan pemberdayaan dan perhatian dari pemerintah serta masyarakat luar, agar objek yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan menjadi sumber pendapatan daerah dari segi pariwisata. Objek-objek wisata yang sudah masuk kedalam program pengembangan pemerintah daerah dan ada juga yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satunya ada objek wisata budaya. Adapun objek wisata budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yakni :

Tabel I.1 Potensi Wisata dari Seni Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi

| No. | Seni Budaya | Lokasi (Kecamatan) |
|-----|------------------------------------|--|
| 1 | Perahu Baganduang | Kuantan Mudik |
| 2 | Manjopuik Limau Lubuk Jambi | Kuantan Mudik |
| 3 | Rumah Godang/Rumah Adat/Rumah Suku | Kuantan Tengah |
| 4 | Silat Pangean | Pangean |
| 5 | Bakayat | Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi |
| 6 | Batobo | Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi |
| 7 | Randai | Kuantan Tengah, Pangean, Inuman, Baserah, Logas Tanah Darat, Cerenti |

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Kuansing.

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa seni budaya di Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah seni budaya Perahu Baganduang. Perahu

Baganduang juga bisa dikatakan kesenian rakyat, karena Perahu Baganduang merupakan kesenian dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Alasan memilih seni budaya Perahu Baganduang karena semua tugas dan fungsi di atas belum terlaksana secara maksimal pada tahun 2016-2017. Pada zaman modern seperti saat sekarang ini kesenian budaya perahu baganduang sudah mulai hilang dari peradaban masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, dan Dinas yang terkaitpun sepertinya sudah mulai tidak terlalu memperhatikan dan membina kesenian budaya perahu baganduang, padahal dalam seni budaya perahu baganduang banyak mengandung nilai social, salah satunya nilai kebersamaan masyarakat sehingga seni budaya perahu baganduang perlu adanya perhatian khusus dari dinas ataupun pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Aktor dari Perahu Baganduang tersebut juga berasal dari masyarakat sekitar. Perahu-perahu ini dirangkai menjadi satu (*diganduang*) dengan menggunakan [bambu](#), Perahu baganduang pertama kali digelar sebagai [festival](#) pada tahun 1996. Festival perahu baganduang dilaksanakan sekali dalam setahun, terutama pada saat [hari raya Idul Fitri](#). Perahu-perahu ini kemudian dihias agar menarik. Hiasan-hiasan yang digunakan, antara lain : [bendera](#), daun kelapa, payung, kain panjang, buah labu, foto presiden dan wakil presiden, dan benda-benda lainnya yang memiliki simbol adat. Misalnya, [padi](#) yang melambangkan kesuburan [pertanian](#) dan tanduk kerbau yang melambangkan [peternakan](#).

Dalam festival tersebut, masyarakat disuguhkan berbagai hiburan, di antaranya Rarak Calempong, Panjek Pinang, dan kegiatan Potang Tolugh. Proses pembuatan perahu baganduang sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu

dengan memakai upacara [Melayu](#). Festival Perahu Baganduang merupakan atraksi pertunjukan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Kuantan Mudik, Kuantan Singingi. Perahu baganduang merupakan perahu yang digandengkan atau dirangkaikan sebanyak 3 perahu dengan menggunakan bambu dengan dihiasi ornament-ornamen tradisional yang berwarna-warni dan memiliki simbol adat setempat. Beberapa hiasan yang sering dipakai adalah daun kelapa, bendera, tanduk kerbau, padi, buah labu, cermin, lima payung, kain panjang, foto presiden dan wakil presiden, payung kuning, dan berbagai pernak-pernik lain yang digunakan untuk menghias perahu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri dan dihadiri ribuan orang layaknya festival pacu jalur.

Sejarah tradisi perahu baganduang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Baru pada tahun 1996, tradisi ini dibuat ke dalam bentuk festival yang melibatkan banyak orang dan menjadi salah satu agenda wisata di hari raya. Pada zaman dahulu, masyarakat Kuantan Mudik Kenegrian Lubuk Jambi memiliki muda-mudi yang kreatif. Mereka memiliki gagasan yang luas dan bergotong royong dalam membangun desa. Salah satu kegiatan bersama yang dilakukan para muda-mudi pada saat itu adalah turun ke sawah. Mereka mendirikan kelompok-kelompok satuan kerja yang beranggotakan para orang tua dan bujang gadis. Kelompok satuan kerja tersebut dinamakan Batobo dengan alat-alat pertanian yang digunakan untuk menggarap sawah pun masih tradisional seperti kerbau, cangkul dan sebagainya. Alat-alat inilah yang nantinya muncul sebagai simbol sejarah pada perahu-perahu baganduang yang ditampilkan dalam festival.

Hiasan yang ditampilkan pada perahu ternyata tidak asal-asalan. Semuanya memiliki makna tersendiri, berikut ini beberapa jenis ornament yang biasanya dipakai beserta filosofinya:

1. Perahu digandeng tiga memberi makna tali nan tigo sapilin.
2. Lantai yang dipagar merupakan arena untuk pencak silat.
3. Beranda menyimbolkan balai adat.
4. Tanduk melambangkan nilai keadilan.
5. Labu-labu melambangkan nilai persatuan dan kesatuan.
6. Cermin polos melambangkan ungkapan urang malin nan barompek yang suluahbendang dalam nagori.
7. Lima buah payung menjadi lambang rukun islam.
8. Padi baranggik dan dua buah merawah merupakan lambang kemakmuran.
9. Bulan bintang merupakan lambang ketuhanan.
10. Kain panjang yang warna warni memberi lambang masyarakat yang banyak suku.
11. Foto presiden dan wakil presiden melambangkan dukungan masyarakat Kuansing kepada pemerintah.
12. Payung kuning melambangkan kemakmuran.

Perahu Baganduang merupakan tradisi kesenian rakyat masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik secara turun temurun. Perahu Baganduang sudah mulai hilang semenjak zaman telah mengalami era yang modern. Perubahannya terjadi pada waktu pertunjukan. Sekarang pertunjukan Perahu Baganduang hanya ditampilkan sesekali pada setahun sekali.

Kalau tidak budayanya maka masyarakatnya yang mengalami perubahan. Hal itu terjadi pada masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor pendorong dari masyarakat untuk merubah pola pikir mereka ke arah yang lebih modern. Ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap Perahu Baganduang.

Perahu Baganduang di Kuantan Mudik sekarang sudah terkikis fungsinya dan kurang digemari masyarakat seperti masa dahulu. Yang mana pada masa dahulu, masyarakat berbondong-bondong untuk melihat kesenian rakyat Perahu Baganduang. Perahu Baganduang secara umum berfungsi untuk menghibur, namun didalam hiburan tersebut terselip pesan-pesan moral serta faedah-faedah yang berasal dari cerita-cerita yang dibawakan. Selain hiburan, Perahu Baganduang juga berfungsi untuk mempertebal rasa ketradisian dan mempererat hubungan antar masyarakat. Dengan adanya pertunjukan Perahu Baganduang, masyarakat dapat berkumpul serta menjalin silaturahmi antar sesama. Ketidak tertarikan masyarakat dan generasi muda terhadap Perahu Baganduang secara tidak langsung menghilangkan fungsi dari Perahu Baganduang itu sendiri. Perahu Baganduang pada masa ini disaingi oleh pengaruh dari budaya luar seperti masuknya, orgen tunggal, band, internet dan lainnya.

Pola pikir yang sudah maju dan perkembangan zaman menjadi hal yang utama penyebab minat masyarakat terhadap Perahu Baganduang berkurang. Masyarakat bosan melihat Perahu Baganduang yang hanya diisi dengan cerita-cerita dahulu. Mereka terlalu sering melihat pertunjukan Perahu Baganduang dengan cerita lama sehingga mereka tidak tertarik. Dikalangan remaja Perahu

Baganduang tidak menjadi hiburan yang favorit, mereka mengabaikan Perahu Baganduang. Para remaja lebih suka menyaksikan pertunjukan modern dari pada pertunjukan Perahu Baganduang, seperti menonton acara orgen tunggal yang telah menjadi favorit disetiap kalangan. Pertunjukan Perahu Baganduang biasanya ditampilkan pada saat-saat penting seperti, pengangkatan penghulu baru, pernikahan, hari raya dan sebagainya. Namun sekarang posisi Perahu Baganduang untuk mengisi acara-acara tersebut sudah digantikan oleh orgen tunggal.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut:

1. Pengembangan objek wisata seni budaya Perahu Baganduang kurang mendapat perhatian pemerintah terutama dari Dinas terkait dalam membina kelompok-kelompok seni budaya Perahu Baganduang di Kecamatan Kuatan Mudik. Hal ini terbukti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga hanya melaksanakan program pengembangan wisata sebagai berikut:

Tabel I.2 Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2017.

| No. | Kegiatan | Tahun Anggaran (Rupiah) | |
|-----|---|-------------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 |
| 1 | Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat Kabupaten | Rp. 40.000.000,00 | Rp. 30.700.000,00 |
| 2 | Pawai Budaya Pacu Jalur | Rp. 70.490.000,00 | - |
| 3 | Pelatihan Tari dan Musik Daerah | Rp. 63.950.000,00 | - |
| 4 | Penyelenggaraan Event Nasional Pacu Jalur | Rp. 1.150.885.000,00 | Rp. 1.052.480.000,00 |
| 5 | Parade Tari Tingkat Kabupaten | Rp. 70.000.000,00 | Rp. 65.350.000,00 |
| 6 | Festival Kesenian Daerah Pacu Jalur | Rp. 150.885.000,00 | Rp. 81.860.000,00 |
| 7 | Pagelaran Kesenian Daerah | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 44.900.000,00 |
| 8 | Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara | Rp. 103.537.000,00 | - |
| 9 | Kemitraan Pariwisata | - | Rp. 312.700.000,00 |

| | | | |
|----|--------------------------|-------------------|---|
| 10 | Lomba Photo Sadar Wisata | Rp. 25.470.000,00 | - |
|----|--------------------------|-------------------|---|

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa program kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga belum banyak upaya untuk mengembangkan objek wisata seni budaya. Terlihat dari tahun 2016-2017 hanya ada 3 program seni budaya yakni kegiatan pacu jalur, kesenian tari, dan pagelaran kesenian daerah. Data tersebut menunjukkan belum ada upaya pengembangan seni budaya secara khusus seperti halnya pengembangan seni budaya Perahu Baganduang.

2. Pengembangan seni budaya kesenian Perahu Baganduang kurang mendapat perhatian pemerintah terutama dari Dinas terkait.
3. Belum terealisasinya perencanaan pengembangan seni budaya yang ada, sehingga banyak seni budaya yang belum mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik, terutama seni budaya Perahu Baganduang.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya Perahu Baganduang”.

B. Perumusan Masalah

Dari fenomena dan gejala-gejala sebagaimana telah dipaparkan, maka penulis dapat menemukan suatu rumusan masalah yakni :”Bagaimana Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya Perahu Baganduang?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni Budaya Perahu Baganduang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

c. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya pengembangan pariwisata budaya, sehingga terciptanya pengelolaan pariwisata yang baik.

- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pengembangan pariwisata.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005: 20).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Titik berat Otonomi di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai banyak manfaat. Disatu pihak kemajuan ini membuka peluang yang lebih besar bagi setiap Pemerintah Daerah lebih mampu menangkap aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih akomodatif dalam pembuatan keputusan guna penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintah dan pembangunan (Sarundajang, 2001: 1). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004: 10) Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005: 22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Konsep Peranan

Perkembangan pemerintahan ke arah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampaikan informasi. Masyarakat menuntut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat diatur dan dipenuhi. Menurut pendapat Soekanto (2004: 243) “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang. Seseorang akan dinyatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hak dan kewajiban tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut. masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut pendapat Soekanto (2004: 244) peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan mencakup tiga aspek. *Pertama*, peranan merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat. Perilaku seseorang yang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. *Kedua*, peranan merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. *Ketiga*, peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan

mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012: 10).

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menentukan perilaku seseorang. Pola perilaku yang dilakukan dalam kelompok merupakan karakteristik dari individu. Perilaku dari setiap individu merupakan hubungan sebab akibat dalam pranata sosial. Peranan menurut pendapat Soekanto tersebut mencakup tiga hal, yaitu tentang hak dan kewajiban, perilaku, serta tanggapan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan acuan seseorang dalam menjalankan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan norma dan etika dalam menjalankan peranan. Tanggapan merupakan penilaian dari pihak lain terhadap orang yang telah melaksanakan peranan.

Sadu Wasistiono (2003: 27) berpendapat bahwa: “Perkembangan pemerintahan tak lepas dari perkembangan sejarah terbentuknya suatu masyarakat. Pada saat beberapa orang berkelompok secara permanen untuk kemudian membentuk masyarakat, pada saat itu pula terbentuk embrio pemerintahan, yakni suatu kelompok atau institusi yang berfungsi mengatur dan

mengurus kehidupan masyarakat agar dapat tetap bertahan terhadap serangan kelompok luar”.

Pendapat tersebut menandakan, bahwa perkembangan suatu pemerintahan mengikuti perkembangan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Pemerintah dibentuk oleh masyarakat, pemerintah berperan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah tersebut akan menciptakan ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat.

Peran dan fungsi pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya.

4. Konsep Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Siswanto (2010: 7) mengartikan manajemen sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Syafiie (2014: 127) memberi definisi manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarah serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka

mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Terry (2011: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

Menurut Terry (2011: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan

visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2011: 82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry (2011: 62).

4) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Konsep Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu



instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

a. Tugas

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Dale Yoder dalam Moekijat (1998: 9) mengatakan "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998: 10), mengemukakan bahwa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998: 10), menyatakan bahwa "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus". Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2008 pada Pasal 52 berbunyi: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sedangkan pada Pasal 53 berbunyi: Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie fungsi merupakan

sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal (2008: 22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Zainal (2008: 22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2008 pada Pasal 54 yang berbunyi:

- 1) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- 2) Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan promosi skala kabupaten

6. Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau usulan-usulan. Menurut Adisasmita (2011: 113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Islamy (2004: 13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Adapun proses dari kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap berikutnya pada proses kebijakan publik.
2. Tahap implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, sekaligus studi yang sangat krusial.
3. Tahap evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Kebijakan (*policy*) adalah proses memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan (Random dalam Amin Ibrahim, 2004: 2). Publik (*public*) adalah sejumlah manusia yang memiliki perasaan berfikis, perasaan dari harapan, sikap dari tindakan yang benar dari baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie dalam Ibrahim, 2004: 3).

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif. Jadi, secara praktis dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah alat (*tool*) dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai kepercayaan sosial (*social beliefs*) tentang kebaikan-kebaikan (*goodness*) (Nugroho, 2008: 20).

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008: 58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi pada kebijakan untuk mengurus suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dalam konseptualisasinya kebijakan publik memiliki karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam suatu sistem politik yang bisa juga berupa legislatif, eksekutif, dan administrator.

Menurut Nugroho (2008: 103) jenis-jenis kebijakan publik antara lain :

1. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan.
2. Kebijakan yang dibuat hanya oleh eksekutif.
3. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Selanjutnya Nugroho (2008: 115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Dari beberapa pengertian dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi kebijakan untuk mengatur suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengandung beberapa unsur yaitu: adanya serangkaian tindakan dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, adanya pemecahan masalah dan adanya tujuan tertentu. Dengan memadukan keempat unsur di atas. Suharto (2008: 5) menyimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang ikut dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

7. Teori Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh sorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesatu, sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena sesuatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Suwantoro, 2004: 3).

Menurut Sinaga (2010) Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan

kesenangan semata. Selanjutnya Gamal (2002) Pariwisata difenisikan sebagai bentuk. Suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Pariwisata dapat dibedakan berdasarkan atas objek yang dikunjungi maupun maksud wisatawan mengunjungi daerah tersebut, (Sarwono, 2001)

- a. Wisata budaya adalah keadaan budaya setempat merupakan objek wisata utamanya.
- b. Wisata alam adalah keindahan dan keunikan alam menjadi objek utamanya.
- c. Wisata argo adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertanian yang menjadi wisata utamanya.
- d. Wisata wisnu adalah hewan-hewan buruan dalam hutan merupakan objek utamanya.

8. Pariwisata Budaya

Dalam pariwisata, jenis pariwisata yang menggunakan sumber budaya sebagai modal utama dalam atraksi wisata sering dikenal sebagai pariwisata budaya. Jenis pariwisata ini memberikan variasi yang luas menyangkut budaya mulai dari seni pertunjukkan, seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah, pengalaman nostalgia, dan cara hidup yang lain.

Pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang berdasarkan pada mozaik tempat, tradisi, kesenian, upacara-upacara dan pengalaman yang memotret

suatu bangsa dan suku bangsa dengan masyarakat, yang merefleksikan keanekaragaman (*diversity*) dan identitas (karakter) dari masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Pariwisata budaya memanfaatkan budaya sebagai potensi wisata dan budaya yang dibedakan menjadi tiga wujud, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak (Ismayanti, 2010: 111).

B. Kerangka Pikir

Pengembangan pariwisata merupakan kegiatan kompleks, menyangkut wisatawan, kegiatan, sarana prasarana, objek dan daya tarik, fasilitas penunjang, sarana lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus memperhatikan terbinanya mutu lingkungan. Tata letak peruntukan perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara kepentingan pariwisata dengan kepentingan pencagaran. Melalui zonasi yang baik keanekaragaman dapat terpelihara, sehingga wisatawan atau pengunjung dapat memilih rekreasi yang baik (Soemarwoto, 1993: 134).

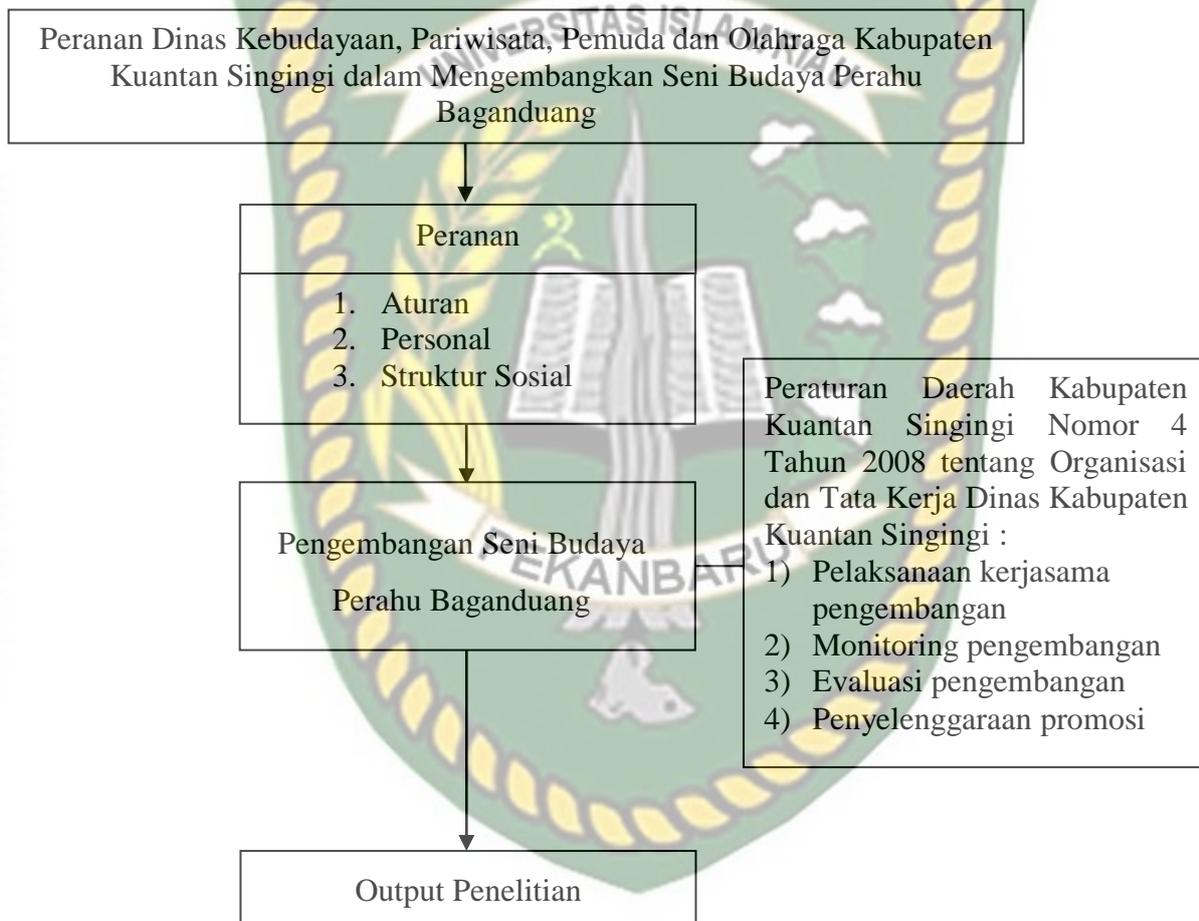
Dengan demikian, bahwa pengembangan pariwisata didalamnya terdapat kegiatan atau usaha yang terkoordinasi untuk mengatur sesuatu yang belum ada serta memajukan atau memperbaiki bahkan meningkatkan sesuatu yang telah ada yang mencakup segi kemasyarakatan dengan memperhatikan mutu lingkungannya.

Pengembangan wisata budaya Perahu Baganduang menjadi domain seluruh pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang memiliki kepedulian yang sama terhadap pariwisata khususnya budaya daerah. Peranan yang paling besar dari pemerintah terletak pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Pemuda, dan Olahraga dalam mengembangkan randai dari kepunahan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini :

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengembangkan Seni dan Budaya



Sumber: Modifikasi dari Sejumlah Dasar Teoritis

C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas dan fungsi mengembangkan pariwisata khususnya Perahu Baganduang.
3. Mengembangkan Seni Budaya adalah upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan, monitoring pengembangan, evaluasi pengembangan, dan penyelenggaraan promosi.
4. Perahu Baganduang adalah salah satu budaya masyarakat Kuantan Singingi yang memiliki nilai pariwisata yang pantas untuk dikembangkan.
5. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam mengembangkan seni budaya Perahu Baganduang adalah mengembangkan Perahu Baganduang berdasarkan tugas dan fungsi yang diembankan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kerjasama pengembangan
Dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kerjasama dengan para kelompok Perahu Baganduang yang masih eksis dan bentuk pembinaan, pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana.
 - b. Monitoring pengembangan
Dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah terus memantau perkembangan Perahu Baganduang yang telah bekerjasama dengan cara melakukan pengamatan perkembangan dan meminta pertanggungjawaban

dari kelompok Perahu Baganduang atas bantuan yang telah diberikan pemerintah.

c. Evaluasi pengembangan

Dalam penelitian ini adalah evaluasi pemerintah atas upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong perkembangan perahu baganduang dalam bentuk diskusi bersama, mengkaji kelemahan dan kelebihan, mencari solusi bersama.

d. Penyelenggaraan promosi

Dalam penelitian ini adalah usaha pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mempromosikan Perahu Baganduang ke pelosok daerah maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional dengan cara menyelenggarakan even Perahu Baganduang, menyertakan Perahu Baganduang dalam kegiatan pariwisata, menjadikan Perahu Baganduang salah satu duta wisata daerah.

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel II.1 Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni dan Budaya Perahu Baganduang

| Konsep | Variabel | Indikator | Intem Penilaian | Skala |
|--|--|---------------------------------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. (Friedman, M, 1998 : 286) | Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya Perahu Baganduang | 1. Pelaksanaan kerjasama pengembangan | - Lokal - Swasta - Nasional - Internasional | Ordinal |
| | | 2. Monitoring pengembangan | - Mendata kegiatan - Pengamatan perkembangan - Meminta pertanggung jawaban | Ordinal |
| | | 3. Evaluasi pengembangan | - Diskusi bersama - Mengkaji kelemahan dan kelebihan - Mencari solusi bersama | Ordinal |
| | | 4. Penyelenggaraan promosi | - Menyelenggarakan even Perahu Baganduang - Mengikutsertakan Perahu Baganduang dalam kegiatan pariwisata - Menjadikan Perahu Baganduang duta wisata daerah. | Ordinal |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas dan fungsi mengembangkan kebudayaan dan pariwisata seni budaya Perahu Baganduang bersama dengan masyarakat. Ditetapkannya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian, karena saat ini semakin berkurangnya kelompok Perahu Baganduang yang masih tetap melestarikan seni dan budaya khususnya Perahu Baganduang di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Informan

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2002: 720).

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pengembangan objek wisata Perahu Baganduang, informan penelitian dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel III.I Jumlah Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|---------------|---|-----------|
| 1. | Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi | 1 |
| 2. | Kepala Bidang Pariwisata | 1 |
| 3. | Seksi pengembangan objek wisata dan aktifitas wisata | 1 |
| 4. | Seksi promosi dan pemasaran wisata | 1 |
| 5. | Seksi sarana dan prasarana wisata | 1 |
| 6. | Ketua LAM Kuantan Singingi | 1 |
| 7. | Ketua Kelompok Perahu Baganduang | 1 |
| 8. | Tokoh Masyarakat | 3 |
| Jumlah | | 10 |

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Lexy J. Moleong, 2005: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang

diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. (Sugiyono, 2008: 300)

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam pengembangan seni budaya perahu baganduang, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap (Riduan dalam Rahman, 2009: 80).

Menurut Prof. Dr. Burhan Bungin (2009: 1080) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informan oleh pewawancara.

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005: 171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Key informannya adalah: Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Seksi pengembangan objek wisata dan aktifitas wisata, Seksi promosi dan pemasaran wisata, Seksi sarana dan prasarana wisata, Ketua LAM Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Kelompok Perahu Baganduang.

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah: masyarakat yang terlibat dalam seni budaya perahu baganduang.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah: seseorang atau kelompok yang mengetahui tentang informasi seni budaya perahu baganduang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari angket dan wawancara terhadap sampel penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

- a) Keadaan geografis Kabupaten Kuantan Singingi.
- b) Struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
- c) Data Kelompok Perahu Baganduang.
- d) Aktivitas Kelompok Perahu Baganduang.
- e) Even Pariwisata Budaya

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

1. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil untuk mendukung pengambilan kesimpulan penelitian.
3. Dokumentasi yaitu suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai permasalahan yang akan diteliti.

G. Model Analisis Data Kualitatif

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Disini eneliti mulai melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap data yang telah disusun berdasarkan kategori. Pengamatan lebih terfokus kepada masing-masing kategori, sehingga mendapatkan gambaran lebih terperinci dari data masing-masing data yang telah

terkumpul. Apabila data yang terkumpul dianggap kurang, peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali dengan kriteria data yang lebih spesifik.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September sampai Januari 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu ke- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan dan penyusunan UP | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Kuisisioner | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi Survy | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | |
| 6 | Survy Lapangan | | | | | | | | | | | | | x | x | X | | | | | |
| 7 | Analisis data | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi) | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 9 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 10 | Ujian Konferehensif Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 11 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| 12 | Penggandaan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut.

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C–36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c–22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk

menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

1. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarak kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

2. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

3. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan

Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

4. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Adapun tugas instansi ini adalah : *“Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga daerah”*.

2. Visi

Visi yang dimaksud dalam konsep ini adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, produktif dan inovatif dalam menghadapi tantangan tugas

di masa depan dalam rangka perwujudan harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka tertentu.

Dengan konsep tersebut di atas dan mengacu kepada visi Kabupaten Kuantan Singingi yakni, *“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, relegius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera (BERCAHAYA),* maka perlu dirumuskan visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan berpedoman kepada Visi Kabupaten dan Visi 5 (lima) Tahun Kepala Daerah.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang lebih jelas
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Rumusan Visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dimaksud adalah sebagai berikut : *“Mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Daerah Tujuan Wisata, yang Berbudaya, Pemuda danOlahraga yang Handal Berprestasi”*

Dalam ungkapan Visi di atas, terkandung makna :

1. Negeri Berbudaya yakni negeri yang masyarakatnya mengetahui dan memahami nilai-nilai budaya daerah dan mempedomani norma-norma adat istiadat yang berlaku secara turun temurun yang merupakan warisan dari nenek moyang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Daerah Tujuan Wisata, yakni Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, pasilitas umum pasilitas pariwisata aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (*UU RI No 10 Thn 2009*).
3. Olahraga yang berprestasi yakni bersaing di Indonesia.
4. Dengan kedatangan wisatawan diharapkan terbukanya peluang ekonomi /kesempatan kerja bagi masyarakat, serta adanya peningkatan penerimaan daerah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi.
5. Pengembangan objek Pariwisata tidak boleh bertentangan dengan Agama dan Budaya
6. Pemuda yang handal dan berprestasi

3. Misi

Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan misi yang diembannya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan SDM di bidang Kepariwisata yang dapat mengelola potensi budaya, kesenian dan Alam yang ada menjadi objek dan tujuan wisata Domestik maupun Manca negara.
- b. Menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan.
- c. Mempromosikan secara luas tentang Kepariwisata Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat lokal, nasional, regional dan Internasional.
- d. Menyusun dan memberlakukan Regulasi tentang Pengusahaan Bidang Kepariwisata dalam rangka Pengawasan dan ketertiban serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Program
- 2) Sub Bagian umum
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Kebudayaan :
 - 2) Seksi Pengajian Sejarah, Museum dan Nilai Tradisional;
 - 3) Seksi Kesenian;
- d. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
- e. Bidang pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan Generasi Muda ;
 - 2) Seksi Pembinaan Olahraga;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

- a. Bidang pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala bidang pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan objek dan aktifitas wisata, promosi dan pemasaran wisata, sarana dan prasarana wisata;
- c. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meyelenggarakan fungsi.
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan objek dan aktifitas wisata, promosi, dan pemasaran wisata, sarana dan prasarana wisata;
 - 2) Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengembangan objek dan aktifitas wisata, promosi, dan pemasaran wisata, sarana dan prasarana;
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan objek dan aktifitas wisata, promosi dan pemasaran, wisata, sarana dan prasarana wisata;
 - 4) Pengkoordinasian pengelolaan pengembangan objek dan akatifitas wisata, promosi pemasaran wisata,sarana dan prasarana wisata;

- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan objek dan aktifitas wisata, promosi, sarana dan prasarana wisata;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- d. Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - e. Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Kepala Seksi;
 - f. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;

Adapun tugas dan fungsi Seksi dari Bidang Pariwisata sebagai berikut:

a. Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata

1. Seksi pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

2. Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata mempunyai tugas peyiapan dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggarakan kegiatan pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata;
3. Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata;
 - b) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengembangan objek dan aktifitas wisata;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan objek dan aktifitas wisata;
 - d) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengembang objek dan aktifita wisata;
 - e) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengelolaan pengembangan objek dak aktifitas wisata;
 - f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengembanagan objek dan aktifitas wisata;

- g) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- h) Pelaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksanaan;

Rincian tugas Seksi Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data Pengembangan Objek dan Aktifitas Wisata;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- d) Melaksanaa pemetaan kebutuhan saran dan prasarana pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- e) Menyiapkan bahan telaahan pengembangan objek dan aktifitas wisata;

- f) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- g) Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- h) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja seksi pengembangan objek dan aktifitas wisata;
- j) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata

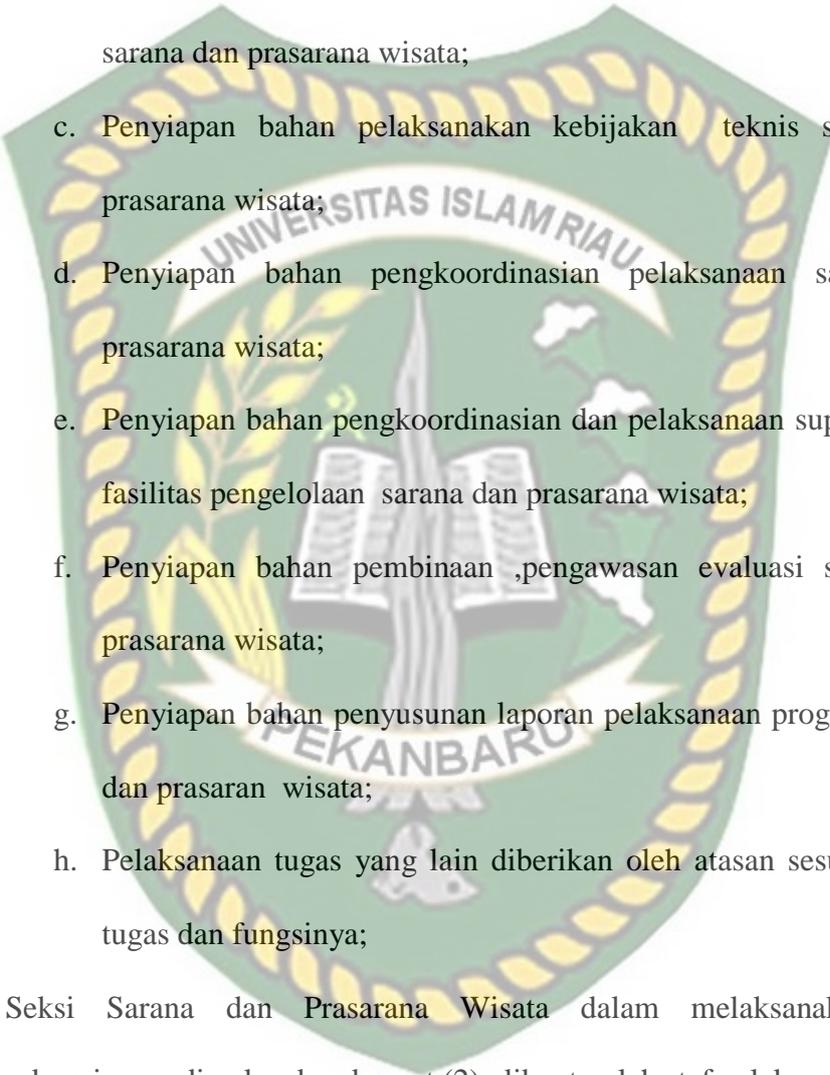
1. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan promosi dan pemasaran wisata;
3. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata daalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan pemasaran wisata;

- 
- b) Penyiapan bahan dan penyusun rencana program dan anggaran promosi dan pemasaran wisata;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis promosi dan pemasaran wisata;
 - d) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata;
 - e) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervise dan fasilitas pengelolaan promosi dan pemasara wisata;
 - f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan evaluasi promosi dan pemasaran wisata;
 - g) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program promosi dan pemasaran wisata;
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Seksi promosi dan pemasaran wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.
- Rincian tugas seksi promosi dan pemasaran wisata adalah sebagai berikut:
- a) Melaksanakan pengumpulan, idintifikasi, pengelolaan, dan penyajian data promosi dan pemasaran;
 - b) Menyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis promosi dan pemasaran wiasata;

- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran promosi dan pemasaran wisata;
- d) Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana promosi dan pemasaran wisata;
- e) Menyiapkan bahan telaahan promosi dan pemasaran wisata;
- f) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan promosi dan pemasaran wisata;
- g) Menyiapkan bahan pembinaan, promosi dan pemasaran wisata;
- h) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi promosi dan pemasaran wisata;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata

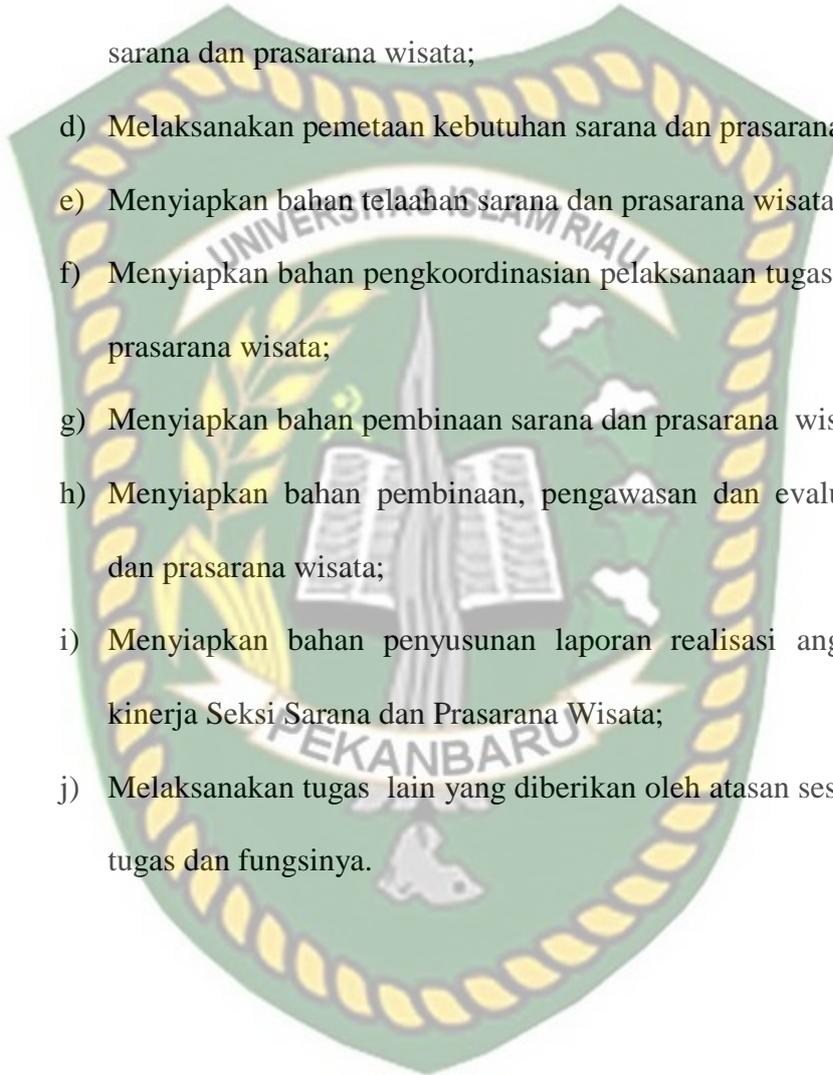
1. Seksi sarana dan Prasarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
2. Seksi Sarana dan Prasarana wisata mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan ,pembinaan ,penbawasan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan srana dan prasarana wisata;
3. Seksi sarana dan prasarana wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi;

- 
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ,sarana dan prasarana wisata;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran sarana dan prasarana wisata;
 - c. Penyiapan bahan melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana wisata;
 - d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan sarana dan prasarana wisata;
 - e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervise dan fasilitas pengelolaan sarana dan prasarana wisata;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan ,pengawasan evaluasi sarana dan prasarana wisata;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program sarana dan prasaran wisata;
 - h. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana.

Rincian tugas seksi Sarana dan Prasarana Wisata adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data sarana dan prasarana wisata;

- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis sarana dan prasarana wisata;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran sarana dan prasarana wisata;
- d) Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana wisata;
- e) Menyiapkan bahan telaahan sarana dan prasarana wisata;
- f) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sarana dan prasarana wisata;
- g) Menyiapkan bahan pembinaan sarana dan prasarana wisata;
- h) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana wisata;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang di berikan kepadanya dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1. | SMA | 3 | 30% |
| 2. | DIPLOMA | 1 | 10% |
| 3. | Strata Satu (S1) | 4 | 40% |
| 4. | Strata Dua (S2) | 2 | 20% |
| Jumlah | | 10 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan

informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 3 orang atau 30%, diploma sebanyak 1 orang atau 10%, sarjana sebanyak 4 orang atau 40%, dan pascasarjana sebanyak 2 orang atau 20%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah sarjana yaitu sebanyak 4 orang.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam befikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

| No | Tingkat Umur | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 1. | 21 – 30 | 1 | 10% |
| 2. | 31 – 40 | 4 | 40% |
| 3. | 41 – 50 | 3 | 30% |
| 4. | >51 | 2 | 20% |
| Jumlah | | 10 | 100 % |

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 10%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 4 orang atau 40%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 30%, dan yang berumur >50 tahun sebanyak 2 orang atau 20%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat

ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 31-40 orang yang di jadikan informan sebanyak 4 orang atau 40% sudah berumur 31-40 tahun.

B. Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya

Perkembangan pemerintahan ke arah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampakan informasi. Masyarakat menuntut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat diatur dan dipenuhi. Menurut pendapat Soekanto (2004: 243) “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang. Seseorang akan dinyatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hak dan kewajiban tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut. masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut pendapat Soekanto (2004: 244) peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan mencakup tiga aspek. *Pertama*, peranan merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat. Perilaku seseorang yang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. *Kedua*, peranan merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. *Ketiga*, peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1. Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan

Dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kerjasama dengan para kelompok Perahu Baganduang yang masih eksis dan bentuk pembinaan, pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan, yaitu : apakah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kuantan Singingi pernah melakukan kerjasama dalam mengembangkan seni budaya Perahu Baganduang?

A Lokal

Dalam permasalahan ini ialah apakah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan kerjasama dalam mengembangkan seni budaya Perahu Baganduang? Sesuai dengan pernyataannya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“Kalau masalah kerjasama yang kami lakukan itu pasti pernah, kerjasama dalam mengembangkan budaya seni baganduang antara dinas dengan kelompok perahu baganduang, kerjasama yang kami lakukan ya seperti memberikan bantuan dan pembinaan terhadap kelompok seni budaya perahu baganduang”.

Seperti halnya setiap dinas selalu berusaha bagaimana cara mengembangkan seni dan melestarikan seni budaya yang ada di sekitarnya, begitu juga dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, pasti selalu ada cara atau program yang akan dilakukan pihak dinas dalam mengembangkan seni budaya perahu baganduang, baik seperti pelatihan atau pemberian sarana demi perkembangan seni budaya perahu baganduang. Sesuai dengan pernyataannya Seksi sarana dan prasarana wisata mengatakan bahwa :

“Kami bekerjasama dengan dengan tokoh masyarakat, ketua kelompok Perahu Baganduang, dan beberapa orang masyarakat yang ikut membantu, kerjasama yang kami lakukan terutama memfasilitasi sarana dan prasarana agar pengembangan seni budaya perahu baganduang tidak mengalami kesulitan”.

Kerjasama sama antara pihak dinas dan kelompok perahu baganduang bukan hanya memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan tetapi pihak kedinasan juga memberikan pelatihan, seperti meningkatkan SDM sehingga pengembangan yang dilakukan benar-benar mencapai tujuan. Sementara itu Seksi promosi dan pemasaran wisata mengatakan bahwa :

“Pengembangan seni budaya tidak semata hanya memberikan sarana dan prasarana tetapi pihak dinas juga bekerjasama dengan masyarakat dalam hal bagaimana seni budaya perahu baganduang ini bisa dikenal oleh masyarakat umum, contoh kerjasamanya meningkatkan event serta atraksi seni dan budaya, bisa juga dengan penyelenggaraan pagelaran/pentas kesenian rakyat dan tradisional”.

Kerjasama yang dilakukan pihak dinas tidak hanya tergantung kepada pemberian sarana dan prasarana saja tetapi perlu adanya kerjasama dalam memperkenalkan seni budaya perahu baganduang ke masyarakat.

Pernyataan ketiga informan terhadap indicator kerjasama pengembangan, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan kerjasama dengan kelompok perahu baganduang yang ada, kerjasama yang dilakukan seperti memberikan pelatihan, meningkatkan SDM, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan kelompok perahu baganduang serta selalu diadakannya penyelenggaraan seni budaya perahu baganduang itu sendiri.

B Swasta

Dalam permasalahan ini apakah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan seni budaya Perahu Baganduang? Sesuai

dengan pernyataannya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“Kerjasama yang kami lakukan baru antar local yaitu antara pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, kami belum mencoba melakukan kerjasama dengan pihak swasta, karena kami rasa kerjasama dengan pihak swasta akan sulit terlaksana jika kerjasama antara kami dengan kelompok perahu baganduang belum berjalan sepenuhnya”.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi hanya baru bekerjasama dengan kelompok perahu baganduang belum melibatkan pihak swasta karena jika kerjasama ini apa bila banyak pihak dilibatkan akan sulit berjalan apabila kerjasama pihak kedinasan dengan kelompok perahu baganduang belum berjalan sepenuhnya. Tapi apabila kerjasama antar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan kelompok perahu baganduang sudah berjalan dengan baik maka kerjasama yang akan dilakukan selanjutnya sudah pasti melibatkan pihak swasta karena akan mempermudah program pengembangan seni budaya perahu baganduang. Sesuai dengan pernyataannya Seksi promosi dan pemasaran wisata mengatakan bahwa :

“saya rasa dalam program pengembangan seni budaya perahu baganduang ini kami masih kerjasama antara pihak dinas dengan kelompok seni budaya perahu baganduang yang baru terlaksana, sebab kami belum melibatkan pihak lain selain dengan kelompok perahu baganduang”.

Sebenarnya kerjasama yang baru terjalin antara pihak dinas dengan kelompok seni budaya perahu baganduang saja, belum melibatkan pihak manapun ini dikarenakan pihak dinas terlebih dahulu harus memperbaiki kerjasama antar local dahulu setelah itu baru melibatkan pihak lainnya sehingga semakin

mempermudah pengembangan seni budaya perahu baganduang dan akan lebih mudah mempromosikannya seni budaya perahu baganduang kemasyarakat luas.

Sementara itu ketua LAM Kuantan Singingimengatakan bahwa :

“sebenarnya itu sudah coba kami usulkan kepada pihak dinas, bahwa program pengembangan ini harus banyak melibatkan pihak, bisa bekerjasama dengan pihak swasta contohnya, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Setau saya belum ada dilibatkan pihak swasta dalam program pengembangan seni budaya perahu baganduang ini”.

Sebenarnya ketua LAM sudah mengusulkan banyak pihak yang harus dilibatkan tetapi hanya saja belum terealisasikan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Pernyataan ketiga informan terhadap indicator kerjasama pengembangan, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah melakukan kerjasama atau belum pernah melibatkan pihak swasta dalam program pengembangan seni budaya perahu baganduang yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

C Nasional

Dalam permasalahan ini apakah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan kerjasama secara nasionaldalam mengembangkan seni budaya Perahu Baganduang?Sesuai dengan pernyataannya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“Nah ini sebenarnya tujuan kami melakukan kerjasama dengan kemerntrian pariwisata budaya sehingga seni budaya perahu baganduang ini bisa dikenal masyarakat yang lebih luas, tapi tentu kami

mempersiapkan dahulu baik itu kesiapan kelompok seni budaya perahu baganduang maupun kesiapan kami dalam program pengembangan ini”.

Sebenarnya ini sudah termasuk dalam perencanaan yang ingin kami lakukan tapi tidak semudah itu tercapai tentu memerlukan waktu dan proses yang matang untuk melakukan kerjasama dengan kementerian pariwisata dan budaya. Sesuai dengan pernyataannya Seksi sarana dan prasarana wisata mengatakan bahwa :

“harusnya seperti itu, tapi kan program pengembangan ini tidak sembarangan langsung melakukan kerjasama yang lebih luas. Jadi kami lakukan kerjasama local dulu, terus baru swasta dan seterusnya baru secara nasional dan tidak berkemungkinan bisa dilakukan kerjasama secara internasional”.

Kerjasama secara nasional memang belum pernah dilakukan karena semua butuh proses dan persiapan yang matang. Sementara itu Seksi promosi dan pemasaran wisata mengatakan bahwa :

“program pengembangan seni budaya perahu baganduang tidak semudah yang dibayangkan, jika seni budaya perahu baganduang ini sudah mantap untuk dilakukan event atau pagelaran maka setelah itu baru kerjasama yang lebih luas lagi kita kerjakan. Contohnya dengan kementerian pariwisata dan budaya”.

Kerjasama dengan kementerian pariwisata dan budaya perlu persiapan yang cukup matang, bagaimana mungkin pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi bisa melakukan kerjasama dengan kementerian pariwisata dan budaya apabila kelompok perahu baganduang belum memiliki persiapan yang matang, contohnya sudah mampu untuk tampil dalam pagelaran seni budaya di tingkat kabupaten/kota dahulu.

Pernyataan ketiga informan terhadap indicator kerjasama pengembangan, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi belum sampai ketahap melakukan kerjasama secara nasional sehingga program pengembangan ini baru mencapai tahapan kerjasama antar local saja yang baru berjalan.

D Internasional

Dalam hal ini, apakah pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan kerjasama secara internasional untuk melakukan pengembangan seni budaya Perahu Baganduang? Sesuai dengan pernyataannya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“Kerjasama itu pernah kami lakukan seperti yang saya katakana di atas tadi, tapi kalau kerjasama secara internasional selama saya menjabat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ini saya rasa itu belum pernah kami lakukan karena terlebih dahulu paling tidak seni budaya yang berusaha kami kembangkan harus mantap dulu atau paling tidak penampilannya sudah mencapai 80% jadi tidak perlu diragukan lagi”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah dilakukan kerjasama internasional karena pihak dinas perlu mempersiapkan hasil kerjasama secara local dulu setelah baru bisa melakukan kerjasama secara internasional. Sesuai dengan pernyataannya seksi sarana dan prasarana wisata mengatakan bahwa :

“kalau untuk kerjasama secara internasional ini belum pernah kami lakukan sama sekali karena kami perlu menyelesaikan kerjasama antar local dulu setelah itu kalau program pengembangan ini tentu kami sudah siap untuk melakukan kerjasama internasional”.

Kerjasama yang dilakukan hanya baru mencapai kerjasama antar local dan belum pernah dilakukan kerjasama secara internasional karena perlu banyak pertimbangan. Sementara itu Seksi promosi dan pemasaran wisata mengatakan bahwa :

“itu sebenarnya sudah menjadi tujuan utama kami bahwa seni budaya Perahu Baganduang ini bisa dikenal tidak hanya di Indonesia saja tapi menjadi objek seni budaya yang dikenal oleh seluruh internasional, tapi kami juga harus mengakui itu akan sulit terjadi apabila program perencanaan ini tidak berjalan sesuai tujuan awal, jadi kerjasama internasional itu bisa dilakukan hanya saja kami perlu waktu untuk melakukan itu”.

Sebenarnya tujuan utama dari program pengembangan seni budaya Perahu Baganduang ini bisa dikenal oleh masyarakat luas bukan hanya masyarakat sekitar ini saja, tapi ini memerlukan waktu yang cukup lama dan kesiapan dari kelompok seni budaya Perahu Baganduang di kancah internasional.

Pernyataan ketiga informan terhadap indikator kerjasama pengembangan, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan kerjasama tetapi kerjasama yang dilakukan hanya baru sampai kerjasama local belum mencapai kerjasama internasional, kerjasama yang dilakukan antar local seperti memberikan pelatihan, meningkatkan SDM, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan kelompok perahu baganduang serta selalu diadakannya penyelenggaraan seni budaya perahu baganduang itu sendiri.

2. Monitoring Pengembangan

Dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah terus memantau perkembangan Perahu Baganduang yang telah bekerjasama dengan cara melakukan pengamatan perkembangan dan meminta pertanggungjawaban dari kelompok Perahu Baganduang atas bantuan yang telah diberikan pemerintah, apakah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan pengawasan terhadap perkembangan seni budaya perahu baganduang? Sesuai dengan pernyataannya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“Pasti, kami dari pihak dinas selalu mengawasi bagaimana perkembangan seni budaya perahu baganduang, kalau pihak dinas tidak mengawasi perkembangan seni budaya perahu baganduang bagaimana mungkin program pengembangan itu akan berjalan dengan baik”.

A Pengamat perkembangan

Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tidak mungkin lepas tangan dalam hal pengawasan seni budaya perahu baganduang, karena setiap halnya pengembang perlu adanya pengawasan sehingga pengembangan itu sendiri bisa berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Sesuai dengan pernyataannya Seksi pengembangan objek wisata dan aktifitas wisatamengatakan bahwa :

“Oh jelas, kami dari pihak dinas selalu memantau bagaimana jalannya perkembangan dari seni budaya perahu baganduang, setiap latihan selalu ada pegawai dari kedinasan mencatat bagaimana perkembangan seni budaya perahu baganduang setelah diadakannyua kerjasama seperti di awal tadi”.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingiselalu melakukan pengawasan terhadap bagaimana jalannya

perkembangan seni budaya perahu baganduang. Sementara itu Ketua LAM Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“Pengawasan terhadap program pengembangan seni budaya perahu baganduang tidak hanya dilakukan pihak dinas, kami dari pihak Lembaga Adata Melayu Kabupaten Singingi juga ikut mengawasi bagaimana jalannya pengembangan seni budaya perahu baganduang”.

B Mendata kegiatan

Pernyataan ketiga informan terhadap indicator monitoring pengembangan seni budaya Perahu Baganduang, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan pengawasanterhadap bagaimana jalannya perkembangan seni budaya perahu baganduang tersebut.

Pertanyaan kedua, Pengawasan seperti apa yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengembangan seni budaya perahu baganduang?apakah pihak dinas datang langsung ke tempat kelompok perahu baganduang?. Menurut Seksi pengembangan objek wisata dan aktifitas wisata mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan ya kami dari pihak dinas menunjuk pegawai dari kedinasan untuk mencatat bagaimana jalannya perkembangan seni budaya perahu baganduang itu sendiri. Jelas, setiap paling tidaka seminggu sekali ada dari pihak dinas yang emmantau atau dating langsung ke tempat kelompok perahu baganduang”.

Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menunjuk pegawai yang memonitor perkembangan seni budaya perahu baganduang dan juga menunjuk pegawai yang dating langsung ke tempat kelompok perahu baganduang dalam melakukan pengawasan. Sesuai dengan pernyataannya Ketua Kelompok Perahu Baganduang mengatakan bahwa :

“iya pihak dinas memang selalu melakukan pengawasan, contohnya kami kelompok perahu baganduang harus ada laporan perkembangan perahu baganduang ini, seperti penambahan anggota atau sebagainya. Dan masalah ada apa tidaknya pegawai yang datang langsung ketempat kami ya ada, kalau tak salah ada empat orang atau lima orang yang selalu berkunjung kesini sekali dalam dua minggu mungkin”.

C Meminta pertanggung jawaan

Ditambahkan oleh Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa :

“Memang ada pegawai dinas yang datang menjenguk perahu baganduang dan mencatat apa saja yang kelompok perahu baganduang perlukan, tapi pegawai dinas tidak begitu rutin datang, paling tidak ya sekali dalam dua minggu atau satu bulan sekali datangnya, ini saja sudah lama pihak dinas tidak datang”.

Pernyataan informan terhadap indikator monitoring pengembangan yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengembangan seni budaya perahu baganduang, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pihak dinas melakukan pengawasan seperti mencatat jalanya perkembangan seni budaya perahu baganduang dan juga mendokumentasikan jalannya perkembangan, masalahnya pihak dinas tidak rutin datang langsung ke tempat di mana seni budaya perahu baganduang tersebut berada.

3. Evaluasi Pengembangan

Dalam penelitian ini adalah evaluasi pemerintah atas upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong perkembangan perahu baganduang dalam bentuk diskusi bersama, mengkaji kelemahan dan kelebihan, mencari solusi bersama.

A Mengkaji kelemahan dan kelebihan

Dari teori di atas menimbulkan pertanyaan, Apakah pernah diadakan evaluasi oleh

pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan kelompok perahu baganduang? Dan evaluasi seperti apa yang dilakukan pihak dinas? kapan evaluasi itu diadakan? Sesuai dengan pernyataannya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“kami dari pihak kedinasan ada mengadakan evaluasi, tapi evaluasi yang kami adakan ya berbentuk mengundang seluruh kelompok perahu baganduang untuk ikut berdiskusi bagaimana jalannya pengembangan seni budaya perahu baganduang, tapi bukan mengkaji kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan tapi berdiskusi apa yang menjadi masalah dilapangan dalam pengembangan seni budaya perahu bganduang, memang evaluasi ini tidak terlalu rutin kami lakukan, karena tidak mungkin kami selalu mengundang kelompok perahu baganduang ke kanor”.

B Diskusi bersama

Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah ada melakukan evaluasi yang berbentuk seperti diskusi atau mencari jalan keluar apa yang menjadi kesulitan dalam mengembangkan seni budaya perahu baganduang tersebut, tetapi evaluasi yang dilakukan tidak terjadwal atau tidak rutin diadakan evaluasi. Sesuai dengan pernyataannya Seksi sarana dan prasarana wisata mengatakan bahwa :

“kalau menurut saya evaluasi itu memang perlu diadakan agar kami dari pihak kedinasan mengetahui apa saja yang menjadi kesulitan dair kelompok perahu baganduang dilapangan dalam menjalankan program pengembangan seni budaya perahu baganduang itu sendiri, tapi evaluasi ini kalau dari kami sering menanyakan apa saja yang masih kurang alat-alat atau hal-hal yang diperlukan oleh kelompok perahu baganduang itu sendiri ”.

C Mencari solusi bersama

Pernyataan Seksi sarana dan prasarana wisata evaluasi yang dilakukan

menggambarkan hanya berfokus kepada bidangnya saja yaitu mengkaji apa sarana dan prasarana yang diperlukan oleh kelompok perahu baganduang. Sementara itu Ketua Kelompok Perahu Baganduang mengatakan bahwa :

“Kalau masalah evaluasi saya juga bingung dengan apa itu evaluasi, karena yang saya ketahui kami di undang oleh pihak dinas palingan baru dua kali, dan itu hanya untuk membicarakan apa yang kami butuhkan, tapi setelah kami ungkapkan apa yang jadi keluhan kami respon dari pihak dinas saya rasa cukup lambat, sehingga kami cukup membutuhkan waktu yang lama agar apa yang kami minta dari pihak kedinasan baru terwujud, ya diskusi seperti biasa aja itu jarang kami lakukan dengan pihak kedinasan, malahan kami berdiskusi sering tidak ada dari pihak kedinasan itu sendiri”.

Pernyataan ketiga informan terhadap evaluasi pengembangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan kelompok perahu baganduang, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa evaluasi memang pernah ada diadakan antara pihak kedinasan dan kelompok perahu baganduang tapi ini tidak rutin dilakukan, sebab pihak dinasn berfikir tidak mungkin mereka selalu mengundang kelompok perahu baganduang ke kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, tapi kelompok perahu baganduang sering melakukan diskusi bagaimana nasib seni budaya perahu baganduang tanpa ada nya pihak dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Penyelenggaraan Promosi

Dalam penelitian ini adalah usaha pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mempromosikan Perahu Baganduang ke pelosok daerah maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional dengan cara menyelenggarakan even Perahu

Baganduang, menyertakan Perahu Baganduang dalam kegiatan pariwisata, dari teori diatas menimbulkan pertanyaan apakah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pernah menyelenggarakan promosi seni budaya perahu baganduang?Kaapan itu diadakan dan dalam bentuk seperti apa? Sesuai dengan pernyataannya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“kalau masalah promosi saya kira untuk masyarakat kabupaten kuantan singing sudah mengetahui bahwa seni budaya perahu baganduang itu sendiri, tapi kalau untuk masyarakat provinsi saya kira ini menjadi program yang mau kami jalankan, tapi belum mencapai ketahap promosi itu sendiri, kami baru menjalankan program pengembangan seni budaya perahu baganduang, dan penyelenggaraan promosi tentu perlu banyak pertimbangan, pembiayaan atau kesiapan dari kelompok perahu baganduang itu sendiri”.

A Menyelenggarakan even perahu baganduang

Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah memprogramkan untuk menyelenggarakan promosi tapi ini belum terlaksana. Sesuai dengan pernyataannya Seksi promosi dan pemasaran wisatamengatakan bahwa :

“promosi ya, saya rasa ini tidak mudah dilakukan dan kami belum pernah menadakan promosi atau penyelenggaraan seni budaya perahu baganduang karena apa?karena kami pihak promosi tentu perlu pengesahan atau persetujuan dari kepala dinas dulu dan penyelenggaran promosi yang akan dilakukan tentu perlu banyak pertimbangan juga”.

B Mengikut sertakan perahu baganduang dalam kegiatan pariwisata

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah mengadakan penyelenggaraan promosi seni budaya perahu baganduang. Sementara itu Ketua LAM Kuantan Singingi mengatakan bahwa :

“Nah sebenarnya itu tujuan dari kami, biar masyarakat tau bahwa seni budaya perahu baganduang, dan jika perlu bukan masyarakat kuansing aja yang tau dengan seni budaya perahu baganduang, kalau masalah menjadikan wisata budaya saya rasa memang cukup sulit karena ini tidak setiap hari dilakukan pagelaran seni budaya perahu baganduang”.

C Menjadikan perahu baganduang duta wisata daerah

Di tambahkan oleh Ketua Kelompok Perahu Baganduang, mengatakan bahwa :

“kalau masalah penyelenggaraan promosi saya rasa ini belum dilakukan karena kami masih melakukan pagelaran setiap satu kali dalam satu tahun dan belum ada perayaan yang besar dalam penyelenggaraan kesenian budaya ini, apalagi dijadikan wisata budaya juga belum sebab kami hanya baru mempersiapkan bagaimana pengembangannya, tapi jika besok sudah oke mungkin saja seni budaya perahu baganduang ini menjadi objek wisata budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Pernyataan informan diatas terhadap indicator penyelenggaraan promosi, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah mengadakan promosi seni budaya perahu baganduang, atau belum adanya penyelenggaraan promosi seni budaya perahu baganduang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingisudah cukup berperan dalam mengembangkan seni budaya Perahu Baganduang yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini di tandai dengan sudah diadakannya kerjasama antara pihak kedinasan dan kelompok Perahu Baganduang, pihak dinas juga sudah melakukan monitoring pengembangan atau pengawasan atas program pengembangan seni budaya Perahu Baganduang, dan juga pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

bersama-sama dengan kelompok perahu baganduang sudah melakukan evaluasi pengembangan seni budaya Perahu Baganduang, tapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingibelum pernah melakukan penyelenggaraan promosi atas program pengembangan seni budaya Perahu Baganduang.

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengembangkan seni budaya Perahu Baganduang, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup berperan dalam pengembangan seni budaya Perahu Baganduang.

Selama proses pengembangan terdapat beberapa hambatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengembangkan Seni Budaya Perahu Baganduang, yaitu :

1. Masih kurangnya SDM atau pegawai dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingiyang mengerti betul dengan bagaimana jalannya program pengembangan seni budaya Perahu Baganduang.
2. Keterbatasan dana dalam program pengembangan seni budaya Perahu Baganduang.

3. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi enggan terlibat dalam program pengembangan seni budaya Perahu Baganduang.
4. Pihak kedinasan kesulitan menjadikan seni budaya perahu baganduang sebagai wisata budaya Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan pagelaran seni budaya Perahu Baganduang tidak terlalu sering diadakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori pengembangan dalam penelitian ini, yakni Teori Peran (*Role Theory*) : (1) Kerjasama Pengembangan (2) Monitoring Pengembangan (3) Evaluasi Pengembangan (4) Penyelenggaraan Promosi.

Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi cukup berperan dalam mengembangkan seni budaya perahu baganduang. Peran tersebut terlebih dahulu atas bantuan yang diberikan oleh pihak dinas tentang sarana dan prasarana yang diperlukan oleh kelompok seni budaya perahu baganduang, dan pihak kedinasan juga memfasilitasi setiap pelaksanaan pagelaran seni budaya perahu baganduang. Hal tersebut juga sebagai wujud peran serta mereka dalam pengembangan seni budaya perahu baganduang di Kabupaten Kuantan Singingi.

Melalui penelitian ini, diketahui bahwa masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat menjaga apa yang sudah menjadi budaya atau adat yang sudah ada tidak hilang dari ingatan atau pemikiran masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dan menjaga nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Kelompok Perahu Baganduang juga berharap terus menerus mendapatkan dukungan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi melalui keterlibatan aktif dalam tiap-tiap kegiatan pengembangan seni budaya perahu baganduang.

B. Saran

1. Promosi wisata budaya perahu baganduang harus di tingkatkan lagi. Promosi yang dapat dilakukan melalui media sosial, media cetak serta promosi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat supaya wisata budaya perahu baganduang dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar.
2. Pengelolaan wisata budaya perahu baganduang harus lebih efisien. Pihak-pihak penyelenggara seperti masyarakat setempat dan pemerintah harus lebih kompak untuk mengelola supaya event wisata budaya perahu baganduang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Pihak pemerintah yang menyediakan Anggaran untuk digunakan berlansungnya wisata perahu baganduang harus lebih maksimal, dikarenakan event wisata perahu baganduang ini harus dilestarikan dan dilaksanakan tiap tahunnya.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya bisa lebih giat dan lebih serius dalam mengembangkan seni budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya seni budaya Perahu Baganduang, dan pihak kedinasan seharusnya mampu menjadikan seni budaya yang ada di Kabupaten

Kuantan Singingi sebagai objek wisata budaya sehingga nilai-nilai kebudayaan yang ada tidak menghilang dimuka bumi, dan memperkenalkan seni budaya yang ada atau adat yang ada kepada anak cucu sehingga generasi yang ada bisa menjaga nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terkhususnya seni budaya Perahu Baganduang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- David Osborn Ted Gaebler. (2008). *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta :Teruna Gravika
- Fandeli, C. (2002). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta.
- Gamal, Suwanto, (2002). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta : Grasindo
- Islamy, M Irfal. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta. Bumi Aksara
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lubis, Solly. (2007). *Kebijakan Pubik*. Bandung : Mandar Maju
- Miftah, Thoha. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mill, Robert Christie. Alih bahasa oleh Tri Budi Satrio. (2002). *Tourism The International*. Jakrta: Penerbit Raja Grafindo.
- Moekijat, (1998). *Analisis Jabatan*, Bandung : Mandar Maju
- Ndraha, Talizuduhu, (2011). *Kybernologi sebagai sebuah rekontruksi ilmu pemerintahan*. Jakarta, rineka cipta.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sinaga, Supriono. (2010). *Potensi dan Pengembangan objek wisata di kabupaten Tapanuli Tengah*. Kertas Karya. Program DIII Pariwisata. Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, Soerjono, (2004), *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Siswanto, (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suharto, (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanto, Gamal. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Syafiie, InuKencana, (2005). *Ilmu Administrasi Publik*. jakarta : Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hesse. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman offset.

Terry, G. Rue. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara

Veithzal Rivai, (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk*. Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

Dokumentasi :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang :
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang :
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang : *Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa.

Badan Penerbit Fisipol UIR. Pekanbaru.